

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI PENYUSUNAN
ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN
TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD**

(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sijunjung)

ARTIKEL ILMIAH

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:
VONNY NOFISA AMRIL
12960/2009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan
Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sijunjung)**

Oleh :
Yonny Nofisa Amril
12960 / 2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
September 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Juli 2014

Pembimbing I



Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19720910 199802 2 003

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung)

Vonny Nofisa Amril

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : vonnynofisa@yahoo.com

ABSTRACT

This study aimed to determine: (1) The effect of public accountability of the managerial performance SKPD. (2) The effect of budget participation of the managerial performance SKPD. (3) The effect of budget goal clarity of the managerial performance SKPD. Type of research is causative. Population in this study were working units (SKPD) in Sijunjung district. The technique of sampling is the total sampling method. Data collection method is survey used a questionnaire. Analysis used multiple regression analysis using SPSS version 16. The results showed that: (1) Public accountability does not significant positive effect of managerial performance SKPD. (2) Participation budgeting significant positive effect of managerial performance SKPD. (3) Clarity of budget targets does not significant positive effect of managerial performance SKPD.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD. (2) Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. (3) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sijunjung. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode *total sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akuntabilitas publik tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. (2) Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. (3) Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

1. PENDAHULUAN

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Unit-unit kerja organisasi publik diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan. Menurut Indra (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Menurut Mahoney *et. al.* (1963) dalam Natalia (2010), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan.

Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah, oleh karena itu kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja manajerial pemerintah daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002).

Hal ini menegaskan dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja manajerial pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal.

Disamping akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran juga dapat meningkatkan kinerja manajerial SKPD. Menurut Brownell dalam Coryanata (2004:619) partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh seseorang dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan prestasi (kinerja) yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Adanya partisipasi mendorong setiap manajer untuk meningkatkan prestasinya dan menganggap bahwa target organisasi adalah merupakan target pribadinya juga (Bambang, 2002).

Disamping partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran juga dapat meningkatkan kinerja manajerial SKPD. Menurut Kenis (1979) dalam Andarias (2009) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi

masa depan secara tepat. Indikator dalam pengukuran kejelasan sasaran anggaran, diantaranya tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan, dan koordinasi.

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis, 1979 dalam Syafrial, 2009). Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran akan membantu aparat pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja yang diharapkan.

Adapun fenomena yang terjadi saat ini, pencapaian target kinerja APBD selama tahun 2012 telah mencerminkan keberhasilan dan realisasi kinerja masing-masing program. Karena APBD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2009, dimana program dan kegiatan disusun berdasarkan sasaran yang termuat dalam dokumen perencanaan umum. Pencapaian target kinerja baru bisa ditampilkan berdasarkan realisasi pencapaian masing-masing SKPD.

Berdasarkan laporan realisasi APBD tahun 2012 terdapat empat SKPD yaitu Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan Dinas Perternakan dan Perikanan yang realisasi anggarannya dibawah 85% dari yang dianggarkan. Kinerja dari empat SKPD ini belum maksimal dikarenakan realisasi APBD belum mencapai target, maksudnya belum sesuai dengan anggaran

yang telah ditetapkan sehingga kinerja dari empat SKPD ini perlu ditingkatkan lagi. (Laporan Realisasi APBD Tahun 2012 Kabupaten Sijunjung)

Adapun penelitian yang dilakukan Citra (2010) menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas se-Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Dinas se-Kota Semarang.

Andarias (2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, pada penelitian ini menggunakan variabel permoderasi yaitu pengawasan internal.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.

Kinerja Manajerial SKPD

Kinerja jika dilihat dari bahasa artinya adalah *performance* yang berarti prestasi. Jadi kinerja merupakan prestasi kerja seorang pegawai. Menurut Mahsun (2006), kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Menurut Pabundu (2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam

periode tertentu. Menurut Indra (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Mahoney *et. al* (1963) dalam Natalia (2010) kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan indikator :

1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, peng-anggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.
3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.
4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.
5. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan dan menagani keluhan pelaksanaan tugas bawahan.
6. Pemilihan Staff, yaitu memeliharakan dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mem-promosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.
7. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.
8. Perwakilan, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain.

Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Selain itu, akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban pembuat keputusan untuk tanggap atas warga perihal kebutuhan mereka dan kemampuan warga untuk meminta pertanggungjawaban pembuat kebijakan atas janji mereka.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Beberapa bentuk dimensi pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah disampaikan oleh Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2001). Menurutnya terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua atau lebih yang mempunyai dampak masa

depan bagi pihak yang membuat keputusan tersebut. Partisipasi penyusunan anggaran yaitu proses dimana pembuatan anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran (Mulyadi, 2001).

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya atau penyusunan anggaran yang memungkinkan bawahan untuk ikut serta bekerja sama menentukan rencana.

Menurut Kenis (1979) dalam Andarias (2009) partisipasi aparatur pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah adalah menunjukkan pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran daerah, diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap anggaran. Hal ini sangat penting karena aparat pemerintah daerah akan merasa produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya. Kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan atau para staf memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan.

Partisipasi penyusunan anggaran terdiri dari 6 indikator (Milani, 1975) dalam eka (2013), yaitu:

1. Sejauh mana anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para pengurus.
2. Alasan-alasan penolakan pihak manajer pada saat anggaran diproses.
3. Keinginan memberikan partisipasi anggaran kepada pihak manajer tanpa diminta.
4. Sejauhmana manajer mempunyai pengaruh dalam anggaran akhir.
5. Kepentingan manajer dalam partisipasinya terhadap anggaran.

6. Anggaran didiskusikan antara pihak manajer puncak dengan manajer pusat pertanggungjawaban pada saat anggaran disusun.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kenis (1979) dalam Ehrman (2006) mengatakan terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam rencana strategis daerah (Renstrada) dan program pembangunan daerah (Properda). Menurut Kenis (1979), adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi.

Menurut Kenis (1979) dalam Andarias (2009), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif, hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.

Kenis (1979) dalam Syafrial (2009) mengatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Menurut Locke dan Latham (1984) dalam Samuel (2008), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan:

1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas tugas yang harus dikerjakan.
2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur.
3. Standar, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai.
4. Jangka Waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
5. Sasaran Prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
6. Tingkat Kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Fakhri (2011) menguji Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan secara simultan maupun parsial terhadap kinerja manajerial.

Andarias (2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi di Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

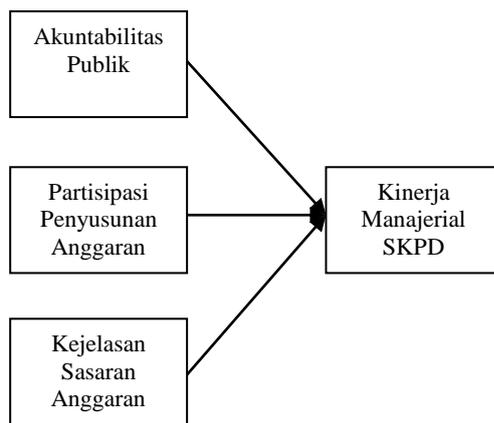
HS Ginting (2010) meneliti tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran

dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat perangkat daerah di kabupaten Karo. Hasilnya partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat perangkat daerah di kabupaten Karo.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti yaitu pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Untuk lebih jelasnya pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka konseptual

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sijunjung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah *total sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di kabupaten Sijunjung yang terdiri dari 35 SKPD. Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan SKPD dan 4 kepala bagian pada masing-masing SKPD, sehingga responden berjumlah 175 orang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data subjek. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner tertutup.

Variabel Penelitian

1. Variabel terikat (Y)

Variabel terikat (*dependent variabel*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial SKPD (Y).

2. Variabel bebas (X)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (*dependent variable*) dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah akuntabilitas publik (X_1), partisipasi penyusunan anggaran (X_2) dan kejelasan sasaran anggaran (X_3).

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju

(SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS), yang digunakan untuk mengukur variabel independen, sedangkan untuk variabel dependen adalah kuesioner (*self rating*) yang dikembangkan oleh Mahoney *et. al* (1963). Setiap responden diminta untuk mengukur sendiri kinerjanya dengan memilih dan/atau menuliskan skala antara 1-9. Skala 1-3 mewakili kinerja di bawah rata-rata, skala 4-6 mewakili kinerja rata-rata dan skala 7-9 mewakili kinerja di atas rata-rata.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner.

Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *Corrected Product Moment*.

Uji reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konstan atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* (α).

Hasil Uji Coba Instrumen

Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa kuat butir-butir variabel yang ada pada penelitian ini. Uji coba instrumen dilakukan pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP dengan syarat telah lulus mata kuliah Akuntansi

Sektor Publik, dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk melihat apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik.

1) Uji Normalitas Residual

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas residual untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* > 0.1 .

3) Uji Heterokedastisitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Analisis Data

1) Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi (*R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat.

2) Persamaan Regresi

Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kinerja manajerial

a = Konstanta

$b_{1,2,3}$ = Koefisien regresi dari variabel independen

e = *error term*

X_1 = Akuntabilitas publik

X_2 = Partisipasi penyusunan anggaran

X_3 = Kejelasan sasaran anggaran

3) Uji F (F-test)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

4) Uji T (*t-Test*)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisa regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Defenisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka perlu menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Kinerja Manajerial SKPD

Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah adalah hasil dari proses aktivitas manajerial sektor publik yang efektif dalam melaksanakan kegiatan manajerial mulai dari proses perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff, negoisasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan.

2. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan. Terdapat empat unsur akuntabilitas publik yang harus dipenuhi, diantaranya adalah akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan.

3. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh aparatur pemerintah daerah di dalam proses menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi dan bagiannya, baik secara periodik maupun tahapan.

4. Kejelasan sasaran anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten Sijunjung. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 35 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan kabupaten Sijunjung yang terdiri dari dinas, kantor, badan, inspektorat daerah, dan kecamatan. Setiap sampel masing-masing SKPD terdiri dari lima responden. Dari 35 SKPD tersebut, disebarakan sebanyak 175 kuesioner. Pada batas akhir pengumpulan data, kuisisioner yang diterima kembali sebanyak 110 kuesioner.

Demografi Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 62,73% atau sebanyak 69 orang, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebesar 37,27% atau sebanyak 41 orang.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa

tingkat pendidikan responden dengan persentase terbesar adalah pada tingkat Strata 1 (S1) sebesar 63,64% atau sebanyak 70 orang. Selanjutnya pada tingkat Strata 2 (S2) sebesar 23,63% atau sebanyak 26 orang, pada tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar 10,91% atau sebanyak 12 orang, pada tingkat Diploma 3 (D3) sebesar 1,82% atau sebanyak 2 orang, dan tidak satupun responden berlatar belakang pendidikan Strata 3 (S3). Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan formal yang ditempuh responden berpendidikan paling banyak pada Strata 1.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa latar belakang pendidikan responden dengan persentase terbesar adalah pada jurusan Lain-lain sebesar 46,36% atau sebanyak 51 orang. Selanjutnya pada jurusan Hukum sebesar 15,45% atau sebanyak 17 orang, pada jurusan Manajemen sebesar 13,63% atau sebanyak 15 orang, pada jurusan Akuntansi sebesar 10,91% atau sebanyak 12 orang. Selanjutnya dari jurusan Teknik sebesar 8,18% atau sebanyak 9 orang, pada jurusan MIPA sebesar 3,63% atau sebanyak 4 orang dan pada jurusan Sastra sebesar 1,82% atau sebanyak 2 orang.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Berkerja

Berdasarkan Tabel 9 terlihat bahwa masa kerja responden dengan persentase terbesar adalah dalam rentang >10 tahun yaitu sebesar 78,18% atau sebanyak 86 orang. Selanjutnya diikuti masa kerja rentang 5-10 tahun sebesar 15,45% atau sebanyak 17 orang, sedangkan rentang 1-5 tahun sebesar 6,36% atau sebanyak 7 orang.

Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Pada variabel X_1 diketahui besarnya nilai mean adalah 40,9364

dengan standar deviasi 3,46748 nilai maximum sebesar 45, nilai minimum sebesar 28. Variabel X_2 diketahui nilai mean 22,3273 dengan standar deviasi 4,00941 nilai maximum 30, nilai minimum sebesar 22. Untuk variabel X_3 diketahui nilai mean 30,6727 dengan standar deviasi 2,78630 nilai maximum 35, nilai minimum sebesar 25. Pada variabel Y dengan nilai mean 53,1182 dengan standar deviasi 11,25740 yang nilai maximum 72, nilai minimum sebesar 17.

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

1. Uji Validitas

Dari Tabel dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Instrumen akuntabilitas publik diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,366, instrumen partisipasi penyusunan anggaran nilai terkecil 0,524, instrumen kejelasan sasaran anggaran nilai terkecil 0,518 dan untuk kinerja manajerial SKPD dengan nilai terkecil sebesar 0,571.

2. Uji Reliabilitas

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel di atas yaitu untuk instrumen akuntabilitas publik 0,832, instrumen partisipasi penyusunan anggaran 0,856, instrumen implementasi kejelasan sasaran anggaran 0,843 dan untuk instrumen kinerja manajerial SKPD 0,912. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran diatas 0,8 sehingga semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Dari hasil pengolahan SPSS versi 16.0 didapat bahwa nilai seluruh variabel dari *kolmogorov smirnov* sebesar 1,316, dengan signifikan 0,063. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas > 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam Tabel 18 menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

3. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa nilai sig variabel-variabel > 0,05 (sig > 0,05), maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada penelitian ini.

Analisi Data

1. Uji Koefisien Determinasi

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* menunjukkan 0,194. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel terikat yaitu kinerja manajerial SKPD adalah sebesar 19,4%, sedangkan 80,6% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

2. Persamaan Regresi

Berdasarkan Tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = -1,052 + 0,380(X_1) + 0,887(X_2) + 0,613(X_3)$$

Dimana:

- X_1 = Akuntabilitas Publik
- X_2 = Partisipasi Penyusunan Anggaran
- X_3 = Kejelasan Sasaran Anggaran
- Y = Kinerja Manajerial SKPD

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar -1,052 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran adalah nol

maka nilai kinerja manajerial SKPD adalah sebesar konstanta (-1,052).

- b. Koefisien akuntabilitas publik sebesar 0,380 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas publik satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja manajerial SKPD sebesar 0,380 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif 0,380.
- c. Koefisien partisipasi penyusunan anggaran sebesar 0,887 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan partisipasi penyusunan anggaran satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja manajerial SKPD sebesar 0,887 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif 0,887.
- d. Koefisien kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,613 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kejelasan sasaran anggaran satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja manajerial SKPD sebesar 0,613 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif 0,613.

3. Uji F (*F-Test*)

Untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan merupakan model tetap dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F_{tabel} dan F_{hitung} atau membandingkan antara nilai sig dan $\alpha = 0,05$. Nilai F_{tabel} untuk $n = 110$ pada $\alpha = 0,05$ adalah 2,69 Nilai F_{hitung} adalah 9,763 sedangkan nilai signifikansi adalah 0,000. Dengan demikian, $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig < α 0,05.

4. Uji t

Uji t statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n-k-1 = 110-3-1 = 106$ adalah 1,9826.

a. Akuntabilitas Publik (X_1) Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Y)

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,214 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,250 < t_{tabel} 1,9826$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,380. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa akuntabilitas publik (X_1) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

b. Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_2) Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Y)

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,002 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 3,181 > t_{tabel} 1,9826$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,887. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan partisipasi penyusunan anggaran (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

c. Kejelasan Sasaran Anggaran (X_3) Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Y)

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,122 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,557 < t_{tabel} 1,9826$. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif yaitu 0,613. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_3 ditolak. Hal ini

menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan kejelasan sasaran anggaran (X_3) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

Pembahasan

a. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini memperlihatkan bahwa aparatur perangkat daerah kabupaten Sijunjung belum memahami prinsip pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran kepada publik.

Akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung belum memberikan pertanggungjawaban atas semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Artinya kinerja manajerial SKPD belum dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

b. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam proses penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja manajerial.

Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung telah membuat anggaran dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari para manajer pada semua tingkatan dan bawahan ikut serta

bekerja sama menentukan rencana. Artinya aparat pemerintah daerah sudah terlibat dalam proses penganggaran daerah dan ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap anggaran. Anggaran yang disusun sudah mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan sebelumnya, dan diperoleh realisasi anggaran yang lebih baik karena adanya tanggung jawab moral dari pelaksana anggaran untuk mencapai dan meningkatkan kinerjanya.

c. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini memperlihatkan bahwa aparat perantara daerah di kabupaten Sijunjung belum memahami anggaran dengan jelas atau pernyataan sasaran anggaran belum dinyatakan secara jelas atau mudah untuk dipahami oleh aparat daerah.

Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung belum menyusun anggaran sesuai dengan sasaran anggaran yang ingin dicapai organisasi. Artinya sasaran anggaran belum dinyatakan secara jelas dan spesifik dan tidak dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, hal ini tidak mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD” adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Sijunjung.
2. Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Sijunjung.
3. Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Sijunjung.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilakukannya hanya pada satu wilayah di Sumatera Barat, yaitu SKPD yang ada di kabupaten Sijunjung sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.
2. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 19,4%. Sedangkan 80,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Kinerja Manajerial SKPD.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kinerja manajerial SKPD.
2. Untuk penelitian selanjutnyadisarankan untuk menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Manajerial SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarias Bangun. 2009. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderating. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen Buku 2*. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala. Jakarta: Salemba Empat
- Bambang Hariadi. 2002. *Akuntansi Manajemen Suatu Sudut Pandang*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Citra, Lardiana Putri. 2010. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dinas se-Kota Semarang. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang
- Deddi Noerdiawan, dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Deki Putra. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Ehrman Suhartono. 2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. SNA 9 Padang. Yogyakarta
- Eka Yhuda Utama. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial, Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Garrison, Ray H. 2010. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat
- Helni Sulastri. 2011. Pengaruh *Strategic Vision*, Transparansi, dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang
- HS Ginting. 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi sektor publik suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Irzal. 2012. Pengaruh Partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD, komitmen organisasi sebagai variabel moderating. *Skripsi*. UNP
- Mahsun, Mohamad, Firma. S, dan Heribertus. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Ed . Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Mardiasmo. 2001. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- _____. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- _____. 2006. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UAD Press
- _____. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Vol. 2*. Hal. 1-17.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Nadirnya. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal*
- Natalia, Dewinda Putri. 2010. Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Nur Endah Wulandari. 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah: kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Pabundu Tika. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Pilipus Ramandei. 2009. Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah Kota Jayapura. *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Samuel Abel Tanta Sembiring. 2008. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap kinerja Manajerial dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening. *Tesis*. USU
- Septi Mardiana. 2010. Pengaruh partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Motivasi sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Universitas Negri Padang
- Silmilian. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah dengan Motivasi Kerja dan *Internal Locus of Control* Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Universitas Negri Padang
- Silvia Karsa. 2010. Pengaruh Transparansi dan Akutabilitas Publik Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Syafriah. 2009. Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara
- Tutik Dwi Karyanti. 2010. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi, dan Sistem Pengukuran Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Tesis*. Universitas Diponegoro
- Yusri Hazmi. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan

Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintahan Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Politeknik Negeri Lhokseumawe.

LAMPIRAN

Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Manajerial SKPD	110	17.00	72.00	53.1182	11.25740
Akuntabilitas Publik	110	28.00	45.00	40.9364	3.46748
Partisipasi Penyusunan Anggaran	110	11.00	30.00	22.3273	4.00941
Kejelasan Sasaran Anggaran	110	25.00	35.00	30.6727	2.78630
Valid N (listwise)	110				

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	110
Normal Parameters ^a	
Mean	.0000000
Std. Deviation	9.96461616
Most Extreme Differences	
Absolute	.125
Positive	.081
Negative	-.125
Kolmogorov-Smirnov Z	1.316
Asymp. Sig. (2-tailed)	.063

a. Test distribution is Normal.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.052	13.769		
	Akuntabilitas Publik	.380	.304	.842	1.188
	Partisipasi Penyusunan Anggaran	.887	.279	.750	1.333
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.613	.394	.778	1.285

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial SKPD

Uji Heterokedasitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	5.466	4.273		1.279	.204
	Akuntabilitas Publik	-.002	.094	-.002	-.018	.985
	Partisipasi Penyusunan Anggaran	-.152	.086	-.194	-1.760	.081
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.020	.122	.018	.165	.869

a. Dependent Variable: ABSUT

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.465 ^a	.216	.194	10.10464

a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja Manajerial SKPD

Uji F (*f-test*)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2990.464	3	996.821	9.763	.000 ^a
	Residual	10823.000	106	102.104		
	Total	13813.464	109			

a. Predictors: (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja Manajerial SKPD

Uji T (*t-test*)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.052	13.769		-.076	.939
	Akuntabilitas Publik	.380	.304	.117	1.250	.214
	Partisipasi Penyusunan Anggaran	.887	.279	.316	3.181	.002
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.613	.394	.152	1.557	.122

a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial SKPD